

## Xi Jinping dan Mobilisasi Sumber Daya Nasional Tiongkok: Model Kepemimpinan Teknokratis dan Implikasinya bagi Indonesia

Erwin Iswari<sup>1</sup>, Effendi Mtr<sup>2</sup>, Tarsisius Susilo<sup>3</sup>, Gusti Bagus Oka Tapayasa<sup>4</sup>, H.D. Arifin Simanjuntak<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI)

E-mail: iswarierwin@gmail.com<sup>1</sup>, effendi45ers@gmail.com<sup>2</sup>, muchsus70@gmail.com<sup>3</sup>, okatapayasa940@gmail.com<sup>4</sup>, arifin.s2806@gmail.com<sup>5</sup>

### Article History:

Received: 10 Agustus 2025

Revised: 19 Agustus 2025

Accepted: 29 Agustus 2025

**Keywords:** Digitalisasi TNI, Industri Pertahanan,, Mobilisasi Sumber Daya, Strategi Pertahanan Indonesia, Teknokrasi, Xi Jinping

**Abstract:** Tulisan ini membahas model kepemimpinan teknokratis Xi Jinping dalam memobilisasi sumber daya nasional Tiongkok, dengan fokus pada sinergi antara riset, teknologi, industri pertahanan, dan pengembangan SDM unggul. Kepemimpinan Xi merepresentasikan konsolidasi politik dan teknokrasi yang menghasilkan percepatan inovasi teknologi, industrialisasi strategis, serta reformasi militer. Tulisan ini juga merefleksikan implikasi strategis bagi Indonesia, khususnya dalam reformulasi strategi pertahanan dan digitalisasi TNI. Metode yang digunakan adalah studi literatur, analisis kebijakan, serta pendekatan komparatif dengan konteks Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun model Tiongkok memiliki potensi untuk menginspirasi pembangunan nasional, Indonesia perlu menjaga keseimbangan antara inovasi, demokrasi, dan kemandirian strategis. Tulisan ini diharapkan dapat memperkaya diskursus mengenai modernisasi pertahanan Indonesia di era digital.

## PENDAHULUAN

Kepemimpinan Xi Jinping telah menjadi fenomena politik global sejak ia menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok pada tahun 2012. Xi bukan hanya seorang politisi, melainkan juga seorang arsitek strategi nasional yang mengarahkan Tiongkok menuju posisi sebagai kekuatan global dominan. Salah satu ciri khas kepemimpinannya adalah kemampuan untuk memobilisasi seluruh sumber daya nasional, mulai dari riset, teknologi, industri pertahanan, hingga pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul. Strategi ini dikenal dengan konsep whole-nation system, yaitu suatu pendekatan pembangunan yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam mengintegrasikan berbagai sektor untuk mencapai tujuan nasional (Zhang, 2020). Konsep ini memperlihatkan bagaimana Tiongkok mengonsolidasikan kekuatan politik, ekonomi, dan teknologi secara sistematis di bawah kendali pusat untuk memastikan stabilitas dan efisiensi kebijakan nasional.

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemimpinan Xi Jinping menandai pergeseran dari model kolektif menuju kepemimpinan yang lebih terpusat. Brady (2019) menjelaskan bahwa Xi menghidupkan kembali ideologi Leninist party-state dengan memperkuat kontrol politik terhadap birokrasi, militer, dan media sebagai bagian dari strategi konsolidasi kekuasaan. Sementara itu, Callahan (2020) menyoroti bahwa visi *China Dream* yang dipopulerkan Xi bukan sekadar retorika politik, melainkan kerangka strategis yang mengarahkan reformasi struktural dalam sains, teknologi, dan industri pertahanan. Adapun penelitian dari Kennedy (2021)

mengkaji bahwa kebijakan inovasi teknologi di bawah Xi diarahkan untuk mencapai *self-reliance* (kemandirian teknologi) yang menjadi fondasi penting dalam menghadapi rivalitas global, khususnya dengan Amerika Serikat.

Dalam ranah global, keberhasilan Tiongkok dalam memobilisasi sumber daya nasional di bawah kepemimpinan Xi memberikan pelajaran penting bagi negara lain, termasuk Indonesia. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara, Indonesia perlu mengkaji bagaimana model kepemimpinan teknokratis dan terpusat seperti Tiongkok dapat memberikan inspirasi maupun tantangan terhadap tata kelola nasional yang berbasis pada prinsip demokrasi dan supremasi sipil. Hal ini menjadi relevan mengingat dinamika geopolitik di kawasan Indo-Pasifik dan Laut Cina Selatan semakin kompleks, menuntut Indonesia untuk memperkuat strategi pertahanan dan digitalisasi militer (Basriza & Nugroho, 2023). Oleh karena itu, refleksi atas kebijakan mobilisasi sumber daya nasional Tiongkok dapat menjadi bahan pembelajaran strategis bagi Indonesia dalam merumuskan sistem pertahanan adaptif, inovatif, dan tetap berlandaskan nilai demokrasi.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan model kepemimpinan teknokratis Xi Jinping dalam mengelola sumber daya nasional; (2) mengkaji sinergi antara riset, teknologi, industri pertahanan, dan SDM unggul sebagai pilar pembangunan Tiongkok; (3) merefleksikan implikasi strategi tersebut bagi Indonesia, khususnya dalam konteks reformulasi strategi pertahanan dan digitalisasi TNI; serta (4) memberikan rekomendasi bagi Indonesia agar dapat mengadaptasi aspek positif dari model Tiongkok tanpa mengorbankan nilai demokrasi dan kedaulatan nasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*library research*), sebagaimana disarankan oleh Creswell (2018) dalam penelitian kebijakan komparatif. Data dikumpulkan dari jurnal akademik internasional yang bereputasi, laporan lembaga penelitian global seperti *Center for Strategic and International Studies* (CSIS) (Kennedy, 2021), serta publikasi resmi pemerintah Tiongkok seperti *White Paper on China's National Defense* (State Council Information Office, 2019). Di sisi lain, sumber domestik mencakup dokumen strategis Indonesia, antara lain Kebijakan Umum Pertahanan Negara 2021–2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI, 2021).

Analisis dilakukan dengan pendekatan komparatif untuk meninjau kesamaan dan perbedaan antara strategi mobilisasi sumber daya nasional Tiongkok di bawah Xi Jinping dan kebijakan pertahanan Indonesia. Metode ini mengacu pada model analisis kebijakan publik yang dijelaskan oleh Dunn (2018), untuk menilai sejauh mana strategi Tiongkok dapat diadaptasi ke dalam konteks demokrasi Indonesia. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, membandingkan berbagai literatur dan dokumen resmi guna memastikan keandalan data. Selanjutnya, interpretasi dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menghasilkan pemahaman komprehensif tentang potensi adaptasi strategi nasional Tiongkok dalam sistem pertahanan Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kepemimpinan Teknokratis Xi Jinping**

Xi Jinping dikenal sebagai pemimpin yang menempatkan teknokrasi sebagai dasar utama dalam pengambilan kebijakan nasional. Berbeda dengan era pendahulunya, Xi banyak mengangkat kader Partai Komunis yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang sains, teknologi, dan rekayasa (STEM), menunjukkan orientasi kebijakan yang lebih berbasis data, inovasi, dan efisiensi (Li, 2016; Ringen, 2016). Pendekatan teknokratis ini memperkuat konsolidasi politik Xi karena

.....

teknokrat dianggap lebih fokus pada hasil pembangunan ketimbang perebutan kekuasaan internal (Shambaugh, 2023). Dalam visi *Chinese Dream*, Xi mengedepankan konsep revitalisasi nasional melalui kebijakan strategis *Belt and Road Initiative* (BRI) yang bertujuan menghubungkan ekonomi Eurasia melalui infrastruktur, perdagangan, dan investasi lintas kawasan (Anthony, 2025; The Geopolity, 2025). BRI terdiri atas dua pilar utama, yakni *Silk Road Economic Belt* sebagai jalur darat penghubung Tiongkok barat dan Eropa, serta *21st Century Maritime Silk Road* sebagai jalur laut yang memperluas jaringan ekonomi hingga Asia Tenggara dan Afrika (Ebrey, 2022). Untuk mendukung pembiayaan proyek tersebut, Xi mendirikan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebagai lembaga multilateral yang berperan dalam pendanaan pembangunan infrastruktur di Asia Pasifik (Asian Development Bank, 2024).

Melalui kebijakan Master Plan, Xi menargetkan tercapainya masyarakat makmur dan kuat pada tahun 2049 melalui peningkatan pendapatan per kapita, kemandirian teknologi, dan modernisasi militer (Congressional Research Service of U.S., 2021; U.S. Department of Defense, 2024). Pendekatan ini mencerminkan visi jangka panjang yang berorientasi pada pembangunan nasional dan peran global Tiongkok, sekaligus memperlihatkan kepemimpinan visioner yang berpadu antara strategi politik, ekonomi, dan pertahanan (Nathan & Scobell, 2014; Bitzinger, 2016).

a. Kebijakan Xi Jinping dalam Melawan Covid-19

Sejak awal 2020, Tiongkok menghadapi tantangan besar akibat pandemi Covid-19 yang diakui secara global oleh WHO pada 11 Maret 2020. Xi Jinping menegaskan bahwa kesehatan rakyat harus menjadi prioritas utama sejajar dengan keamanan nasional, serta memerintahkan pemerintah untuk mengambil langkah tegas (State Council Information Office, 2025). Penanggulangan dilakukan melalui kebijakan tiga tahap, salah satunya adalah lockdown yang dimulai dari Wuhan dan kemudian diperluas ke seluruh Provinsi Hubei. Kebijakan karantina ketat ini disertai pengeralahan tenaga medis militer dan dukungan logistik secara besar-besaran (Congressional Research Service of U.S., 2021).

Pemerintah juga mengatur narasi media massa dengan ketat, termasuk penahanan jurnalis seperti Zhang Zhan yang dianggap menyebarkan informasi berbeda dari kebijakan resmi (Mistreanu, 2023). Pendekatan ini memperlihatkan karakter kepemimpinan Xi yang tegas dan terpusat, di mana kebijakan diambil secara cepat dan langsung dari tingkat tertinggi pemerintahan (Ringen, 2016). Meskipun langkah tersebut efektif menekan penyebaran virus dan menjamin kebutuhan dasar rakyat, kontrol terhadap media menunjukkan corak kepemimpinan otoriter yang menekankan stabilitas politik di atas kebebasan informasi (Shambaugh, 2023).

b. Kebijakan Ekonomi pada Kepemimpinan Xi Jinping

Xi Jinping membangun arah kebijakan ekonomi Tiongkok melalui visi *Chinese Dream* yang menekankan kemajuan nasional, kemandirian ekonomi, dan pengaruh global (Li, 2016). Salah satu instrumen utama kebijakan ini adalah *Belt and Road Initiative* (BRI) yang mencakup *Silk Road Economic Belt* menghubungkan Tiongkok bagian barat dengan Eropa melalui Asia Tengah serta *21st Century Maritime Silk Road* yang menghubungkan pesisir Tiongkok dengan Asia Tenggara, Afrika, dan kawasan lain melalui pelabuhan serta infrastruktur perdagangan (Anthony, 2025; Ebrey, 2022).

Untuk mendukung pendanaan BRI, Xi mendirikan Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) sebagai alternatif bagi lembaga keuangan internasional seperti ADB, IMF, dan World Bank (Asian Development Bank, 2024; International Monetary Fund, 2024). Motivasi di balik kebijakan ini antara lain memenuhi kebutuhan energi untuk mendukung industrialisasi, menyeimbangkan kekuatan global, dan membangun tatanan keuangan baru melalui AIIB sebagai pesaing lembaga finansial lama (World Bank Group, 2024). Selain BRI, Xi juga meluncurkan Master Plan sebagai

strategi jangka panjang untuk menciptakan masyarakat makmur, memperkuat militer, serta menyebarkan budaya Tiongkok, dengan target menjadikan negara tersebut kuat dan sejahtera pada tahun 2049 (Shambaugh, 2023; Nathan & Scobell, 2014). Kebijakan ekonomi Xi Jinping menunjukkan gaya kepemimpinan visioner dan inovatif, dengan keberanian mengambil risiko strategis untuk memastikan stabilitas ekonomi sekaligus memperluas pengaruh global Tiongkok (Rietjens, 2021; The Geopolity, 2025).

## 2. Posisi Tiongkok Sebagai Kekuatan Regional di Asia

Di bawah kepemimpinan Xi Jinping, Tiongkok berkembang pesat dalam bidang ekonomi, politik, militer, teknologi, dan budaya, sehingga menjadikannya sebagai kekuatan regional utama di Asia dan bahkan penantang Amerika Serikat secara global (Shambaugh, 2023).

### a. Ekonomi

Perekonomian Tiongkok berkembang pesat sejak reformasi 1970-an dan kini menjadi kekuatan manufaktur serta teknologi global. Pada 2024, PDB mencapai USD 18,6 triliun dengan pertumbuhan 5,3%. Struktur ekonomi makin beragam dengan dominasi sektor jasa, sementara strategi Dual Circulation memperkuat pasar domestik tanpa melepas peran global (Asian Development Bank, 2024). Kendali negara tetap kuat melalui BUMN di sektor strategis, menjadikan Tiongkok aktor utama dalam ekonomi global dan Asia Timur.

### b. Kebijakan Moneter Tiongkok

Kebijakan moneter dijalankan secara terpusat oleh *People's Bank of China* (PBoC) dengan tujuan menjaga stabilitas harga, mendukung pertumbuhan, dan melindungi sistem keuangan. Berbeda dengan bank sentral Barat yang lebih independen, PBoC terintegrasi dengan struktur pemerintahan sehingga selaras dengan kebijakan fiskal dan pembangunan nasional (International Monetary Fund, 2024).

### c. Pengendalian Inflasi Tiongkok

Pengendalian inflasi dilakukan melalui kombinasi kebijakan moneter, fiskal, dan intervensi administratif. PBoC menjaga stabilitas harga dengan suku bunga dan operasi pasar terbuka. Pada 2024, inflasi tercatat 0,7%, dipengaruhi lemahnya permintaan domestik dan stabilnya harga energi global (World Bank Group, 2024).

### d. Penetapan Suku Bunga Utama Tiongkok

PBoC menetapkan suku bunga melalui *Loan Prime Rate* (LPR) dan *Medium-Term Lending Facility* (MLF). Pada pertengahan 2024, LPR satu tahun 3,45% dan lima tahun 3,95%, sedangkan MLF 2,5%. Kebijakan ini dimaksudkan untuk mendorong investasi sektor riil dan memperkuat permintaan domestik.

### e. Pengendalian Nilai Tukar Yuan

Tiongkok menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali, dengan central parity rate harian Yuan terhadap USD. PBoC menjaga stabilitas melalui operasi pasar valas untuk menghindari depresiasi tajam, sambil mendorong internasionalisasi Yuan melalui kerja sama perdagangan dan keuangan (Li, 2016).

### f. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2024, ekonomi Tiongkok tumbuh sebesar 5,3 persen dengan PDB mencapai 18,6 triliun dolar AS, melampaui target awal meskipun lebih rendah dari dekade sebelumnya. Pertumbuhan ini ditopang oleh konsumsi domestik, ekspor, serta stimulus fiskal dan moneter yang terkoordinasi (Congressional Research Service of the U.S., 2021).

### g. Inflasi

.....

Sepanjang 2024, inflasi Tiongkok rendah di 0,7 persen, di bawah target 3 persen. Kondisi ini menunjukkan lemahnya konsumsi rumah tangga meski pasokan barang stabil. Pemerintah menurunkan suku bunga dan memberikan subsidi energi untuk mendorong daya beli.

h. Perbankan

Sektor perbankan Tiongkok menjadi salah satu terbesar di dunia dengan dominasi bank milik negara. Hingga 2024, total aset perbankan mencapai RMB 439,5 triliun dengan ketahanan tinggi, meski menghadapi risiko sektor properti dan utang daerah (Ringen, 2016).

i. Sistem Pembayaran Nasional

Sistem pembayaran nasional Tiongkok kini menjadi salah satu yang paling maju di dunia. Alipay dan WeChat Pay mendominasi transaksi digital, sementara mata uang digital e-CNY telah digunakan oleh lebih dari 120 juta pengguna. Selain itu, sistem *Cross-Border Interbank Payment System* (CIPS) menjadi alternatif SWIFT untuk transaksi internasional dengan Yuan (The Geopolity, 2025).

Pada tahun 2024, kebijakan fiskal proaktif dilakukan untuk menjaga stabilitas dan mempercepat pemulihan pasca pandemi, dengan belanja negara mencapai RMB 28,5 triliun. Dalam jangka menengah, arah kebijakan fiskal difokuskan pada inovasi industri dan daya saing global, meski Tiongkok menghadapi tantangan berupa ketidakseimbangan fiskal daerah, penurunan populasi, dan tekanan eksternal (Anthony, 2025).

### 3. Politik

a. Politik Dalam Negeri

Politik dalam negeri Tiongkok dituangkan dalam Rencana Lima Tahun (*Five-Year Plan/FYP*), yang saat ini memasuki periode ke-14 (2021–2025). Pertemuan politik tahunan *Lianghui* tahun 2021 menjadi momentum penting karena tidak hanya menetapkan prioritas sosio-ekonomi dan politik nasional, tetapi juga meluncurkan cetak biru pembangunan hingga 2025 dan visi jangka panjang menuju 2035 (Congressional Research Service of the U.S., 2021). Tahun tersebut juga bertepatan dengan peringatan 100 tahun berdirinya Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang mempertegas arah kebijakan strategis negara. Dari sisi ekonomi dan bisnis, pertemuan *Lianghui* memberi sinyal kuat bahwa arah pembangunan Tiongkok menekankan kualitas pertumbuhan daripada sekadar kuantitas, membangun kemandirian dalam teknologi dan manufaktur, serta mempercepat transisi menuju ekonomi rendah karbon demi mendukung target iklim 2030 dan 2060 (Ringen, 2016).

b. Politik Luar Negeri

Kebijakan politik luar negeri Tiongkok pada era Xi Jinping diarahkan untuk memperkuat kepentingan nasional, menjaga legitimasi Partai Komunis, dan menciptakan stabilitas eksternal demi mendukung pembangunan dalam negeri (Shambaugh, 2023). Prinsip utama yang dijunjung adalah ketaatan pada kepemimpinan partai, penghormatan pada kedaulatan, non-intervensi, serta gagasan membangun komunitas internasional dengan nasib bersama. Berbeda dengan periode sebelumnya, politik luar negeri Tiongkok kini tampil lebih asertif dan berorientasi global.

Secara garis besar, terdapat tiga fokus utama. Pertama, memperkuat posisi sebagai kekuatan dunia melalui inisiatif *Belt and Road Initiative (BRI)* yang melibatkan lebih dari 140 negara. Program ini tidak hanya menggerakkan kerja sama ekonomi, tetapi juga menjadi sarana diplomasi

untuk memperluas pengaruh politik dan keamanan Tiongkok di Asia, Afrika, hingga Eropa (Anthony, 2025). Kedua, memperkuat kiprah dalam berbagai organisasi internasional seperti PBB, BRICS, *Shanghai Cooperation Organization* (SCO), dan *ASEAN Plus Three*, guna menyeimbangkan dominasi Barat.

Kebijakan luar negeri Tiongkok juga menegaskan komitmen terhadap *One China Policy* sebagai landasan hubungan internasional, terutama terkait Taiwan, Hong Kong, dan Tibet. Di Laut Tiongkok Selatan, Tiongkok menggabungkan kekuatan diplomasi, ekonomi, dan militer sesuai dengan doktrin perang rakyat di laut untuk memperkuat klaim teritorialnya (Li, 2016). Strategi defensif sekaligus ofensif ini menunjukkan bahwa pencapaian internasional Tiongkok juga diarahkan untuk memperkokoh legitimasi domestik PKT.

Hubungan luar negeri Tiongkok dijalankan melalui diplomasi berciri khas RRT yang memperkuat peran globalnya, termasuk dengan menawarkan inisiatif politik dan ekonomi yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan (The Geopolity, 2025). Pemerintah juga menempuh langkah politik untuk menjaga stabilitas keamanan dalam negeri, di antaranya penegakan hukum tegas terhadap korupsi dan pengawasan sosial berbasis sistem digital nasional yang terintegrasi. Stabilitas politik dijaga melalui mekanisme internal partai seperti Sidang Pleno Komite Sentral CPC ke-19 pada 2022 yang mempersiapkan Kongres Nasional CPC ke-20 dan mengesahkan amandemen konstitusi partai (U.S. Department of Defense, 2024).

Hubungan Indonesia dan Tiongkok ditandai dengan kerja sama ekonomi erat, terutama melalui proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) seperti pembangunan pelabuhan dan jalur kereta cepat. Namun, muncul tantangan politik terkait klaim Tiongkok di Laut Natuna Utara yang tumpang tindih dengan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Indonesia menegaskan posisinya berdasarkan hukum internasional, sementara kedua negara tetap aktif berinteraksi dalam forum multilateral seperti ASEAN dan G20 (Asian Development Bank, 2024).

#### **4. Militer**

Modernisasi militer Tiongkok dimulai sejak 1990-an, terinspirasi dari pengalaman Perang Teluk, dengan menganut doktrin pertahanan aktif yang tidak bersifat agresif namun siap membalas jika diserang. *People's Liberation Army* (PLA) menjadi angkatan bersenjata terbesar di dunia dengan sekitar 2,1 juta personel, dilengkapi kapal induk Liaoning, ratusan kapal selam, rudal balistik canggih seperti Dongfeng-41, serta teknologi militer yang mulai diekspor ke negara berkembang (Li, 2021). Anggaran militer terus meningkat sehingga menempatkan Tiongkok sebagai kekuatan militer nomor dua di dunia setelah Amerika Serikat. Dengan kekuatan ekonomi yang dominan, sistem politik yang stabil, modernisasi militer yang masif, serta pengaruh budaya dan teknologi yang meluas, Tiongkok pada era kepemimpinan Xi Jinping tampil sebagai kekuatan regional utama di Asia dan semakin menguat dalam percaturan global sebagai calon superpower baru.

PLA kini tengah menjalani modernisasi besar-besaran untuk menjadi militer kelas dunia pada pertengahan abad ke-21. Upaya ini mencakup reformasi struktur komando, peningkatan kesiapan tempur, pengembangan teknologi canggih, serta penguatan kemampuan siber dan luar angkasa. Melalui konsep *military-civil fusion*, sektor sipil dan perusahaan teknologi seperti Huawei ikut mendukung inovasi pertahanan (Zhou, 2022). PLA menekankan kualitas dibanding kuantitas dengan fokus pada interoperabilitas, kecerdasan buatan, dan kesiapan menghadapi konflik konvensional maupun non-konvensional.

Doktrin militer PLA berlandaskan konsep Pertahanan Aktif (*Active Defense*), yang bersifat defensif di tingkat strategis namun ofensif di tingkat operasional dan taktis. Di bawah Xi Jinping,

.....

fokus doktrin ini bergeser menuju informatized dan intelligentized warfare yang mengintegrasikan kecerdasan buatan, sistem informasi, dan domain lintas matra (Chen, 2020). Reformasi sejak 2015 menghasilkan pembentukan Theater Commands serta sistem operasi gabungan yang lebih efisien.

PLA merupakan militer partai, bukan militer nasional, dan berada sepenuhnya di bawah kendali Komisi Militer Pusat (CMC) yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal PKT. Struktur baru PLA mencakup lima matra utama dan lima Theater Commands dengan tanggung jawab operasional di berbagai wilayah strategis (Sun, 2021).

a. Administrasi Pertahanan Tiongkok

Administrasi pertahanan Tiongkok sangat terpusat di bawah CMC. Jalur komando bersifat vertikal, dan setiap unit militer memiliki komite partai internal untuk menjamin loyalitas terhadap PKT. Aspek SDM, logistik, dan pelatihan dikendalikan ketat oleh partai, dengan sistem pengawasan internal yang menegaskan kontrol ideologis dan politik (Zhang, 2023).

b. Strategi, Pertahanan, dan Operasi Militer

Strategi pertahanan Tiongkok berfokus pada *Intelligentized Warfare* dengan pemanfaatan AI, big data, dan sistem otonom. Konsep Joint Operations lintas matra diperkuat, mencakup perang non-konvensional di ranah siber dan luar angkasa. Prioritas strategis mencakup reunifikasi Taiwan, stabilitas Laut Tiongkok Selatan, serta dominasi Indo-Pasifik. Sistem pertahanan bersifat multidomain, dengan konsep *Anti-Access/Area Denial* (A2/AD) untuk menahan intervensi asing, khususnya Amerika Serikat (Wang, 2022).

Operasi militer meliputi perang konvensional hingga Operasi Militer Selain Perang (OMSP) seperti bantuan bencana dan misi perdamaian. Fokus utama PLA kini adalah kesiapan tempur di Taiwan dan perairan sengketa. Partisipasi global juga meningkat melalui pangkalan luar negeri di Djibouti serta latihan gabungan dengan Rusia dan Pakistan.

c. Susunan Bertempur (Disposisi)

PLA menata kekuatan dalam lima *Theater Command*: *Eastern* (fokus Taiwan), *Southern* (Laut Cina Selatan), *Western* (Tibet dan perbatasan India), *Northern* (Korea Utara dan Rusia), serta *Central* (pusat kekuasaan Beijing). Selain pangkalan Djibouti, Tiongkok memiliki keterlibatan strategis di Kamboja, Sri Lanka, dan Pakistan, memperkuat proyeksi globalnya (Yu, 2023).

Dalam ranah darat, PLA mengutamakan brigade gabungan dengan mobilitas tinggi dan integrasi AI. Di laut, strategi A2/AD menitikberatkan pada *blue-water navy* dan operasi zona abu-abu. Di udara, PLAAF mengembangkan sistem radar terpadu, pesawat siluman J-20, dan drone tempur untuk superioritas udara (Liu, 2022).

Pendidikan militer kini berbasis teknologi dengan latihan realistis dan kolaboratif antar-matra. Akademi Pertahanan Nasional memperkuat kurikulum AI, siber, dan ruang angkasa. Latihan gabungan multinasional juga menjadi sarana profesionalisasi pasukan.

Kepemimpinan militer tetap terpusat di bawah Xi Jinping melalui CMC, memastikan konsolidasi kekuasaan partai dalam tubuh militer. Reformasi organisasi menegaskan profesionalisme, efisiensi, dan integrasi antar-matra (Huang, 2020).

d. Hubungan Militer Tiongkok–Indonesia

Hubungan pertahanan Tiongkok–Indonesia meningkat pesat sejak terbentuknya Kemitraan Strategis Komprehensif 2013, mencakup pelatihan, pertukaran perwira, dan latihan gabungan dalam kerangka ADMM dan ADMM-Plus. Kerja sama difokuskan pada bidang non-tradisional seperti penanggulangan bencana, keamanan maritim, dan transfer teknologi alutsista, dengan Indonesia tetap menjaga prinsip bebas-aktif (Kemlu RI, 2023).

Meskipun Tiongkok hanya memiliki satu pangkalan luar negeri di Djibouti, terdapat indikasi perluasan fasilitas strategis di Kamboja dan Pakistan. Kemampuan rudal jarak jauh seperti DF-21D

dan DF-26 menunjukkan kapasitas proyeksi regional yang luas. Di sisi lain, Tiongkok juga aktif dalam diplomasi militer, partisipasi misi PBB, dan kerja sama kemanusiaan sebagai bagian dari strategi *soft power* (Suryadinata, 2021). Transformasi militer Tiongkok mencerminkan ambisi menjadi kekuatan dominan dunia dengan perpaduan kekuatan keras dan lunak, serta integrasi penuh antara teknologi, ideologi, dan strategi pertahanan modern.

### **5. Kekuatan Tiongkok dalam Bidang Teknologi**

Tiongkok menjadikan inovasi teknologi sebagai pilar utama pembangunan ekonomi jangka panjang dengan dukungan penuh pemerintah melalui kebijakan strategis dan investasi besar-besaran. Dalam bidang transportasi, meskipun awalnya menghadapi sejumlah kegagalan, teknologi kereta cepat berhasil diimpor, dimodifikasi, dan dikembangkan secara mandiri. Kini, Tiongkok memiliki jaringan kereta cepat terpanjang di dunia dengan tingkat komponen lokal mencapai sekitar 25 persen. Perusahaan-perusahaan teknologi seperti Huawei dan ZTE menjadi pemimpin global dalam jaringan telekomunikasi 5G, sementara dalam bidang komunikasi kuantum, proyek Quantum Science Satellite atau Mozi menjadi yang pertama di dunia yang mampu mengirimkan foton sejauh 1.200 km antara Bumi dan luar angkasa. Inovasi ini menandai tonggak penting dalam pengembangan komunikasi kuantum yang aman karena perlingkungannya bersumber dari hukum fisika, bukan sekadar algoritma matematika. Keberhasilan tersebut menunjukkan bagaimana Tiongkok bertransformasi dari negara pengimpor menjadi inovator dan pemimpin global di berbagai sektor teknologi strategis.

Kualitas peneliti di Republik Rakyat Tiongkok sangat ditopang oleh kebijakan pemerintah yang menjadikan penelitian dan pengembangan (R&D) sebagai prioritas nasional. Melalui strategi *National Innovation-Driven Development*, pemerintah memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui investasi di perguruan tinggi, pembangunan laboratorium canggih, serta program pelatihan dan kolaborasi internasional. Para peneliti tidak hanya berfokus pada teknologi sipil, tetapi juga diarahkan untuk mendukung strategi integrasi sipil-militer agar riset yang dihasilkan memiliki nilai ganda bagi kepentingan ekonomi dan pertahanan. Lembaga seperti *Chinese Academy of Sciences* (CAS), *Chinese Academy of Engineering* (CAE), dan *National Natural Science Foundation of China* (NSFC) memiliki peran sentral dalam mendanai dan mengoordinasikan ribuan proyek penelitian di berbagai bidang strategis, termasuk kecerdasan buatan, bioteknologi, antariksa, dan energi terbarukan.

Selain itu, institusi penelitian di bawah kendali militer seperti *National University of Defense Technology* dan *PLA Information Engineering University* berperan besar dalam pengembangan teknologi pertahanan. Pemerintah juga memperkuat lembaga riset seperti *State Administration of Science, Technology and Industry for National Defense* (SASTIND) yang bertanggung jawab terhadap riset pertahanan, pengadaan alutsista, serta akuisisi teknologi strategis dari luar negeri. Dukungan fasilitas modern, tenaga ahli berkualitas, dan program postdoctoral membuat ekosistem riset di Tiongkok berkembang pesat dan mampu menghasilkan inovasi yang kompetitif secara global.

Produk inovasi teknologi Tiongkok mencakup beragam sektor, mulai dari kecerdasan buatan dengan aplikasi pada pengenalan wajah, analisis big data, transportasi cerdas, hingga sistem militer nirawak. Di bidang telekomunikasi, Tiongkok menguasai jaringan 5G global dan mulai meneliti pengembangan 6G. Dalam industri robotik, Tiongkok menjadi produsen terbesar di dunia, sementara dalam sektor energi terbarukan negara ini memimpin dalam produksi panel surya, baterai litium, dan energi angin. Program antariksa seperti Chang'e-4 yang berhasil mendarat di sisi jauh Bulan, Tianwen-1 yang mengorbit Mars, serta pengoperasian stasiun luar angkasa modular Tiangong menunjukkan ambisi besar Tiongkok untuk menjadi kekuatan ruang angkasa utama

.....

dunia.

Kebijakan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) Tiongkok diarahkan untuk mencapai sasaran jangka menengah dan panjang. Pemerintah menargetkan belanja R&D sebesar 2,5 persen dari PDB pada tahun 2025 dan menguasai teknologi inti di sepuluh sektor prioritas melalui program Made in China 2025. Selain itu, inisiatif China Standards 2035 dirancang untuk menjadikan Tiongkok sebagai penentu standar global dalam bidang 5G, 6G, Internet of Things, serta energi baru. Dalam eksplorasi antariksa dan pengembangan energi hijau, negara ini menargetkan misi berawak ke Bulan dan dominasi pasar energi terbarukan pada dekade mendatang.

Peran pemerintah, sektor swasta, dan komunitas ilmiah menjadi kunci utama dalam keberhasilan pembangunan IPTEK Tiongkok. Kebijakan transformasi industri, integrasi sipil-militer, serta dukungan terhadap kluster inovasi mempercepat komersialisasi hasil riset. Perusahaan swasta seperti Huawei, ZTE, Alibaba, Tencent, BYD, CATL, DJI, iSpace, dan LandSpace berkontribusi besar dalam penelitian di bidang AI, pertahanan, energi, dan antariksa. Ekosistem ilmiah ini diperkuat oleh kerja sama antar lembaga penelitian dan universitas elit seperti Tsinghua dan Peking University, meskipun masih terdapat keterbatasan dalam kebebasan akademik.

Dalam hubungan bilateral, Tiongkok juga memainkan peran penting dalam kerja sama teknologi dengan Indonesia. Bentuk kolaborasi tersebut meliputi transfer teknologi di bidang pertahanan, pengembangan jaringan telekomunikasi dan satelit, serta investasi besar dalam sektor energi terbarukan dan industri baterai litium. Meskipun mempercepat modernisasi teknologi di Indonesia, kerja sama ini juga menimbulkan ketergantungan strategis terhadap teknologi Tiongkok yang berpotensi memengaruhi aspek kedaulatan data dan keamanan ekonomi nasional (Liu, 2022; Wang, 2023).

## **6. Digitalisasi TNI**

Di era peperangan modern, kebutuhan akan TNI yang adaptif menjadi sangat mendesak karena tantangan seperti perang siber, operasi informasi, dan peperangan berbasis teknologi. Reformulasi strategi pertahanan Indonesia perlu memasukkan integrasi big data dan artificial intelligence dalam sistem komando dan kendali, penguatan pertahanan siber sebagai garda depan, modernisasi alutsista dengan basis teknologi digital, pembangunan ekosistem riset pertahanan yang terintegrasi dengan universitas dan industri nasional, serta transformasi budaya organisasi TNI agar lebih adaptif terhadap teknologi baru. Dengan belajar dari pengalaman Tiongkok, Indonesia dapat mengembangkan ekosistem riset dan pertahanan yang solid, sambil tetap menjaga nilai keterbukaan, akuntabilitas, dan kedaulatan nasional. Reformulasi strategi pertahanan harus menempatkan digitalisasi sebagai prioritas sekaligus memastikan kesiapan sumber daya manusia yang mumpuni.

Industri media dan telekomunikasi di Republik Rakyat Tiongkok menunjukkan perkembangan pesat dan terstruktur dengan pengawasan pemerintah yang ketat. China Central Television (CCTV) menjadi saluran utama dengan siaran dalam bahasa Mandarin, Inggris, dan bahasa asing lainnya, sementara lebih dari 3.300 saluran lokal, regional, dan nasional melengkapi jaringan televisi yang sangat luas. RRT menempati posisi tertinggi dalam produksi drama dan jumlah penonton televisi di dunia. Meskipun pasar televisi menjadi lebih liberal setelah bergabung dengan WTO pada 2001, perusahaan asing tetap menghadapi berbagai pembatasan. Sejumlah jaringan internasional seperti CNN, BBC, dan STAR TV masuk ke pasar televisi RRT, tetapi dengan regulasi ketat pemerintah. Selain itu, saluran berbahasa Inggris CCTV telah menembus pasar Amerika Serikat melalui platform internet.

Sektor telekomunikasi RRT dikuasai oleh tiga perusahaan milik negara, yakni China Mobile, China Unicom, dan China Telecom, yang terbentuk melalui restrukturisasi industri pada tahun

2008. Basis pelanggan telepon tetap mencapai 231 juta, sementara layanan seluler melayani lebih dari 1,3 miliar pelanggan. Penggunaan telepon dan SMS sangat tinggi, masing-masing mencapai miliaran menit dan ratusan miliar SMS. Pertumbuhan internet juga signifikan, didorong oleh layanan 4G dan jaringan data seluler yang mencapai miliaran gigabyte. Infrastruktur telekomunikasi diperkuat dengan jutaan base station dan jaringan kabel serat optik yang luas, sementara jumlah website di RRT mencapai jutaan, sebagian besar dioperasikan oleh perusahaan.

Kerja sama teknologi dan transportasi antara Tiongkok dan Indonesia menjadi contoh nyata kolaborasi bilateral. Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KJCB), hasil kerja sama PT KCIC, China Railway, dan BUMN Indonesia, menempuh jarak 142 km dengan kecepatan operasional hingga 350 km/jam, sekaligus menjadi simbol investasi Tiongkok melalui Belt and Road Initiative. Selain itu, Tiongkok berperan dalam pengembangan infrastruktur pelabuhan dan logistik di Batam serta mendukung pengembangan sistem transportasi pintar dan otonom di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Di bidang telekomunikasi, perusahaan Tiongkok seperti Huawei dan ZTE berperan penting dalam pembangunan jaringan 4G dan 5G, layanan cloud, modernisasi broadband, serta pengembangan sumber daya manusia. Kolaborasi ini juga mencakup proyek smart city, smart campus, sistem pengawasan berbasis AI, dan program pelatihan serta beasiswa bagi mahasiswa dan teknisi Indonesia, yang memperkuat integrasi teknologi Tiongkok ke dalam ekosistem digital nasional.

**Tabel 1. Perbandingan Tiongkok dan Indonesia**

| Aspek                | Tiongkok (Xi Jinping)                               | Indonesia                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Riset & Inovasi      | Pendanaan besar, fokus STEM, target dominasi global | Pendanaan terbatas, fokus pada kebutuhan domestik |
| Industri Pertahanan  | <i>Military-Civil Fusion</i> , alutsista canggih    | Berkembang, masih bergantung impor                |
| SDM Unggul           | Program STEM nasional, kader teknokrat              | Mulai meningkat, masih ada kesenjangan digital    |
| Digitalisasi Militer | AI, big data, sistem komando canggih                | Tahap awal, digitalisasi belum merata             |

## KESIMPULAN

Kepemimpinan teknokratis Xi Jinping menunjukkan bahwa integrasi antara riset, teknologi, industri pertahanan, dan sumber daya manusia unggul mampu mendorong Tiongkok menjadi kekuatan global. Model ini menegaskan pentingnya mobilisasi sumber daya nasional yang terencana dan terkoordinasi untuk mencapai kemandirian strategis. Bagi Indonesia, hasil penelitian ini menjadi refleksi bahwa prinsip teknokrasi dapat diadaptasi untuk memperkuat strategi pertahanan dan digitalisasi TNI, dengan tetap mempertimbangkan karakter demokratis bangsa. Penerapan kepemimpinan berbasis teknokrasi di lingkungan pertahanan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, inovasi, dan kesiapsiagaan nasional menghadapi ancaman multidimensi. Indonesia perlu membangun sinergi antara kebijakan politik, ekonomi, dan militer agar strategi pertahanan menjadi lebih adaptif, modern, dan berbasis teknologi. Dalam konteks tersebut,

transformasi digital TNI menjadi prioritas strategis melalui sistem komando berbasis big data dan kecerdasan buatan, penguatan pertahanan siber, serta kolaborasi antara pemerintah, universitas, dan industri pertahanan. Selain itu, teknologi perlu dijadikan pilar utama kemandirian nasional untuk mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing. Penelitian selanjutnya disarankan mengkaji perbandingan penerapan kepemimpinan teknokratis di negara demokratis lain agar diperoleh model adaptif yang sesuai dengan konteks sosial-politik Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Adventure Life. (2020). *History, Politics and Culture of China*. Dipetik 28 Juli, 2025, dari Adventure Life: <https://www.adventure-life.com/china/articles/history-politics-and-culture-of-china>
- Anthony. (2025). *Complete History of China: Timeline, Dynasties & Legacy*. Dipetik 29 Juli, 2025, dari The China Journey: <https://www.thechinajourney.com/china-history/>
- ASEAN Defence Ministers' Meeting Plus. (2025). Dipetik 14 Mei, 2025, dari ASEAN Defence Ministers' Meeting: <https://admm.asean.org/>
- Asian Development Bank. (2024). *China, People's Republic of : Rural Vitalization—Rural Wastewater Treatment and Environmental Management*. Dipetik 20 Juli, 2025, dari Asian Development Bank: <https://www.adb.org/projects/53088-001/main>
- Australian Department of Defence. (2022). *Indo-Pacific Endeavour 2022 – Strengthening Regional Partnerships*. Canberra: Government of Australia.
- BBVA Research. (2024). *China: China Banking Monitor 2024*. Dipetik 23 Juli, 2025, dari BBVA Research: <https://www.bbvaresearch.com/en/publicaciones/china-china-banking-monitor-2024/>
- Bitzinger, R. A. (2016). *Defense Innovation and the 21st Century Military: Technology and the Transformation of Military Operations*. London: Routledge.
- Chan, K. W., & Zhang, L. (1999). The Hukou System and Rural-Urban Migration in China. *The China Quarterly*, 818-855. doi:10.1017/S0305741000001351
- Chen, P. (2004). *Modern Chinese: History and Sociolinguist*. Cambridge: Cambridge University Press.
- China Daily. (2023). *How China is reforming its education system*. Diambil kembali dari China Daily: <https://www.chinadaily.com.cn>
- Congressional Research Service of U.S. (2021). *China's Military The People's Liberation Army (PLA) - R46808*. Washington: Congressional Research Service of U.S.
- Cottey, A., & Forster, A. (2004). *Reshaping Defence Diplomacy: New Roles for Military Cooperation and Assistance*. Oxford: Oxford University Press.
- D'Amato, S., Dian, M., & Russo, A. (2023). *International Relations and Area Studies: Debates, Methodologies and Insights from Different World Regions*. Cham: Springer International Publishing AG.

- 
- Daxue Consulting. (2025). *Mobile Payments in China: How China Became a Cashless, Mobile-First Country*. Dipetik 27 Juli, 2025, dari Daxue Consulting: <https://daxueconsulting.com/payment-methods-in-china/>
- Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia. (2025). *Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2024*. Dipetik 28 Juli, 2025, dari Bank Indonesia: [https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI\\_2024.aspx](https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPI_2024.aspx)
- Departemen Operasi Sesko TNI. (2025). *Modul Mata Kuliah Kompetensi Utama 0703: Proses Pengambilan Keputusan Militer Pada Operasi Militer Perang (PPKM OMP)*. Bandung: Sekolah Staf dan Komando TNI.
- Departemen Strategi Sesko TNI. (2025). *Modul Mata Kuliah Kompetensi Utama-03 Kebijakan Hankamneg*. Bandung: Sekolah Staf dan Komando TNI.
- Ebrey, P. B. (2022). *The Cambridge Illustrated History of China (3rd Edition)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Economy, E. C. (2018). *Elizabeth Economy*. Oxford: Oxford University Press.
- Emmers, R. (2010). *Geopolitics and Maritime Security in the South China Sea: A Regional Perspective*. London: Routledge.
- Ernst & Young Global Limited. (2025). *Key to High-Quality Development in The Era of Low Interest Rate — EY Releases Listed Banks in China: 2024 Review And Outlook*. Dipetik 23 Juli, 2025, dari Ernst & Young (EY): [https://www.ey.com/en\\_cn/newsroom/2025/05/ey-releases-listed-banks-in-china-2024-review-and-outlook](https://www.ey.com/en_cn/newsroom/2025/05/ey-releases-listed-banks-in-china-2024-review-and-outlook)
- Fan, C. C. (2007). *China on the Move: Migration, the State, and the Household*. London: Routledge.
- Financial Times. (2025). *China Pushes for Mergers to Create Global Banking and Securities Giants*. Dipetik 24 Juli, 2025, dari Financial Times: <https://www.ft.com/content/fd3f5440-69a1-4e2f-8ee2-19c8f8802d89>
- Food and Agriculture Organization. (2024). *The State of World Fisheries and Aquaculture 2024: Blue Transformation in Action*. doi:<https://doi.org/10.4060/cd0683en>
- Gaubatz, P. (1999). China's Urban Transformation: Patterns and Processes of Morphological Change in Beijing, Shanghai and Guangzhou. *Urban Studies*, 10.1080/0042098992890.
- Global Firepower. (2025). *2025 China Military Strength*. Dipetik 15 Februari, 2025, dari Global Firepower: [https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country\\_id=china](https://www.globalfirepower.com/country-military-strength-detail.php?country_id=china)
- Gyngell, A., & Wesley, M. (2018). *Fear of Abandonment: Australia in the World Since 1942*. Melbourne: La Trobe University Press.
- Hendropriyono, A. M. (2013). *Filsafat Intelijen Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Huld, A. (2025). *Breaking Down the US-China Trade Tariffs: What's in Effect Now?* Dipetik 27 Juli, 2025, dari China Briefing: <https://www.china-briefing.com/news/us-china-tariff-rates-2025/>
-

- 
- International Monetary Fund. (2024). *People's Republic of China: 2024 Article IV Consultation-Press Release; Staff Report; and Statement by the Executive Director for the People's Republic of China*. Dipetik 27 Juli, 2025, dari International Monetary Fund (IMF): <https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2024/08/01/Peoples-Republic-of-China-2024-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-552803>
- Investing.com. (2025). *PDB China*. Dipetik 23 Juli, 2025, dari Investing.com: <https://id.investing.com/economic-calendar/chinese-gdp-461>
- Investor Insights Asia. (2023). *Investor Insights Asia*. Dipetik 25 Juli, 2025, dari Introducing China's Banking Sector: <https://www.investorinsights.asia/post/introducing-china-s-banking-sector>
- Johnson, L. K. (2007). *Strategic Intelligence, Volume 1-5*. Westport: Praeger Security International.
- Joint Military Intelligence College. (2001). *Intelligence Warning Terminology*. Washington DC: Joint Military Intelligence College.
- Kelompok Kerja Intelijen DCAF. (2007). *Praktek-Praktek Intelijen dan Pengawasan Demokratis: Pandangan Praktisi*. Jakarta: Geneva Centre for the Democratic Control of Armed Forces.
- Li, C. (2016). *Chinese Politics in the Xi Jinping Era*. Washington: Brookings Institution Press.
- Mack, J. (2025). *A Brief History of the World To 1500*. Dipetik 30 Juli, 2025, dari Pressbooks: <https://pressbooks.pub/abriefhistory1/chapter/chapter-11-ancient-china/>
- Mark, J. J. (2012). *Ancient China*. Dipetik 29 Juli, 2025, dari World History Encyclopedia: <https://www.worldhistory.org/china/>
- Mistreanu, S. (2023). *China's 'Full-Time Children' Move Back In With Parents and Take On Chores as Good Jobs Grow Scarce*. Dipetik 27 Juli, 2025, dari AP News: <https://apnews.com/article/china-youth-unemployment-jobs-economy-aeddf9fd7c188db7d72dbb3cca6ebbf7>
- Nathan, A. J., & Scobell, A. (2014). *China's Search for Security*. Columbia University Press: New York.
- National Bureau of Statistics of China. (2025). *China Statistical Yearbook 2024*. Dipetik 25 Juli, 2025, dari National Bureau of Statistics of China: <https://www.stats.gov.cn/sj/ndsj/2024/indexeh.htm>
- Norman, J. (2013). *Chinese (18th Printing)*. Cambridge University Press: Cambridge.
- Nye, J. (2004). *Soft Power: The Means to Success in World Politics*. PublicAffairs.
- OECD. (2023). *Education at a Glance 2023: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing. doi:<https://doi.org/10.1787/e13bef63-en>
- Peking University. (2020). *CFPS 2020 National Data*. . Diambil kembali dari China Family Panel Studies: <https://www.issf.pku.edu.cn/cfps/en/data/public/index.htm>
- People's Bank of China. (2025). *2024 Annual Report*. Dipetik 28 Juli, 2025, dari People's Bank of China: <http://www.pbc.gov.cn/en/3688006/index.html>
-

- 
- Pew Research Center. (2017). *Religious belief and national belonging in Central and Eastern Europe*. Diambil kembali dari Pew Research Center: <https://www.pewresearch.org/religion/2017/05/10/religious-belief-and-national-belonging-in-central-and-eastern-europe/>
- Pijar Belajar. (2024). *Peradaban Cina Kuno: Letak, Sistem Pemerintahan dan Kepercayaan, Peninggalan, dan Keruntuhannya*. Dipetik 29 Juli, 2025, dari Pijar Belajar: <https://www.pijarbelajar.id/blog/peradaban-cina-kuno>
- Pratama, A. (2023). Evaluasi Kinerja ADMM-Plus dalam Penguatan Interoperabilitas Militer Regional. *Jurnal Keamanan Regional Asia Tenggara*, 12(1), 55-71. doi:<https://doi.org/10.31219/osf.io/rp9km>
- Reuters. (2025). *China's Big Five Banks Post Slimmer Margins as Economic Challenges Persist*. Dipetik 23 Juli, 2025, dari Reuters: <https://www.reuters.com/markets/asia/chinas-big-five-banks-post-slimmer-margins-economic-challenges-persist-2025-04-29/>
- Rietjens, S. (2021). *Intelligence in Military Missions: Between Theory and Practice*. Breda: Netherlands Defence Academy.
- Ringen, S. (2016). *The Perfect Dictatorship: China in the 21st Century*. Hong Kong: Hong Kong University Press.
- Saronto, Y. W., & Karwita, J. (2012). *Intelijen*. Bandung: Prodi D-III Kepolisian Fisip Universitas Langlangbuana.
- Shambaugh, D. (2002). *Modernizing China's Military: Progress, Problems, and Prospects*. California: University of California Press.
- Shambaugh, D. (2023). *China's Leaders: From Mao to Now*. Queensland: John Wiley and Sons Ltd.
- Silbergeld, J., & Chan, H. (2024). *History of China*. Dipetik 29 Juli, 2025, dari Britannica: <https://www.britannica.com/topic/history-of-China/The-first-historical-dynasty-the-Shang>
- State Administration of Foreign Exchange. (2024). *Quarterly Report on China's Cross-Border Payments*. Dipetik 25 Juli, 2025, dari State Administration of Foreign Exchange: <https://www.safe.gov.cn/en/>
- State Council Information Office. (2025). *Financial Performance Briefing Q2 2024*. Dipetik 23 Juli, 2025, dari State Council Information Office: [http://english.scio.gov.cn/2024ChinaSCIOPressBriefings/node\\_9014600.html](http://english.scio.gov.cn/2024ChinaSCIOPressBriefings/node_9014600.html)
- Sukma, R. (2021). Geopolitical Threats and Indonesia's Defense Policy. *Indonesian Journal of Strategic Studies*, 5(1), 33-45. doi:<https://doi.org/10.14710/ijss.v5i1.11110>
- Thamrin, Y. O., Asruchin, M., Ryantori, Moenawar, M. G., Sidqi, A., Muhaimin, R., . . . Muhammad, S. (2022). *Indonesia dalam Pusaran Disrupsi Global*. (Y. Syukur, A. Ismira, & Marwan, Penyunt.) Jakarta: Perpusnas Press.
- The Geopolity. (2025). *Strategic Estimate 2025*. New York: The Geopolity.
- The International Institute for Strategic Studies. (2025). *The Military Balance 2025*. London: Routledge.
-

- The Observatory of Economic Complexity. (2025). *China*. Dipetik 21 Juli, 2025, dari The Observatory of Economic Complexity (OEC): <https://oec.world/en/profile/country/chn>
- U.S. Department of Defense. (2024). *Military and Security Developments Involving the People's Republic of China 2024*. Virginia: Office of Secretary of Defense.
- UNESCO. (2023). *World Heritage List – China*. Diambil kembali dari UNESCO: <https://whc.unesco.org/en/statesparties/cn>
- Wei, Y.-M., Jin, J.-L., & Wang, Q. (2012). Impacts of Natural Disasters and Disasters Risk Management in China: The Case of China's Experience in Wenchuan Earthquake. Dalam S. Oum, & Yasuyuki Sawada, *Economic and Welfare Impacts of Disasters in East Asia and Policy Responses* (hal. 641-675). Jakarta: ERIA Research Project Report.
- Wikipedia. (2025). *Daftar Bank-Bank Cina*. Dipetik 26 Juli, 2025, dari Wikipedia: <https://zh.wikipedia.org/wiki/>
- Wikipedia. (2025). *History of China*. Dipetik 30 Juli, 2025, dari Wikipedia: [https://en.wikipedia.org/wiki/History\\_of\\_China](https://en.wikipedia.org/wiki/History_of_China)
- World Bank. (2021). *Worldwide Governance Indicator*. Dipetik Mei 11, 2023, dari Worldwide Governance Indicator: <https://info.worldbank.org/governance/wgi/Home/Reports>
- World Bank Group. (2024). *China*. Dipetik 24 Juli, 2025, dari World Bank Group: <https://data.worldbank.org/country/china>
-